
**STRATEGI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS**

Lenny Romauli Marpaung¹, Hermanto Siregar², Tanti Novianti³

¹Mahasiswa Departemen Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi
dan Manajemen IPB

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

³Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

ABSTRACT

The Anambas Islands is one of the regions in the Riau Islands province with a vast proportion of sea, accounting for 98.74 percent of its total area. Through the mechanism of decentralization, most of the functions of marine and fisheries gradually become part of the affairs of the district/city. The transfer of authority is accompanied by the transfer of financing through a balance fund, so that with the increasing funds managed by the region, it is expected that the development of marine and fisheries will improve. DAK is one of the fiscal instruments of the balance fund, which plays an important role in achieving national priority areas (DJPk 2016). As noted by BAPPENAS (2013) in the national development priorities 2015-2019, the main issues and challenges in the development of marine and fisheries are suboptimal production infrastructure, namely in the capture fleet, ports, agricultural roads, land, and access to business development (capital and markets). The aim of this research is to formulate strategies for managing the Special Allocation Fund (DAK) in the marine and fisheries sector from 2011 to 2016 in the Anambas Islands Regency using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Based on the AHP method, the priority strategies include the evaluation of regulations related to DAK management, the placement of support personnel, socialization and law enforcement, improving coordination systems, and forming Joint Business Groups.

Keywords: Analysis Hierarchy Process, Special Allocation Fund, Marine, Fisheries, Strategy

ABSTRAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kepulauan Anambas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki proporsi laut sekitar 98,74 persen dari luas wilayah. Melalui mekanisme desentralisasi, sebagian besar fungsi kelautan dan perikanan secara bertahap menjadi bagian dari urusan daerah kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan pembiayaan melalui dana perimbangan, sehingga dengan semakin meningkatnya dana yang dikelola oleh daerah, diharapkan

pembangunan kelautan dan perikanan menjadi lebih baik. DAK merupakan salah satu instrumen fiskal dana perimbangan, yang mengambil peranan penting dalam pencapaian bidang prioritas nasional (DJPK 2016). Sebagaimana dicatat oleh BAPPENAS (2013) dalam prioritas pembangunan nasional 2015-2019, isu permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah infrastruktur produksi yang belum optimal, yaitu pada armada penangkapan, pelabuhan, jalan usaha tani, lahan dan akses pengembangan usaha (modal dan pasar). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun 2011-2016 di Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode AHP diperoleh urutan prioritas strategi yaitu evaluasi regulasi terkait pengelolaan DAK, penempatan tenaga pendamping, sosialisasi dan penegakan hukum, meningkatkan sistem koordinasi serta membentuk Kelompok Usaha Bersama.

Kata Kunci: *Analysis Hierarchy Process*, Dana Alokasi Khusus, Kelautan, Perikanan, Strategi

PENDAHULUAN

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Subkategori pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di KKA, diikuti dengan subkategori perikanan. Peranan subkategori perikanan terhadap PDRB relatif menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 1). Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dari para pelaku subsektor kelautan dan perikanan dibandingkan subsektor lainnya pada kelompok lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Meningkatnya peranan ini juga menunjukkan bahwa subsektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan potensi besar dalam pembangunan ekonomi khususnya di KKA.

Tabel 1. Peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Anambas (persen)

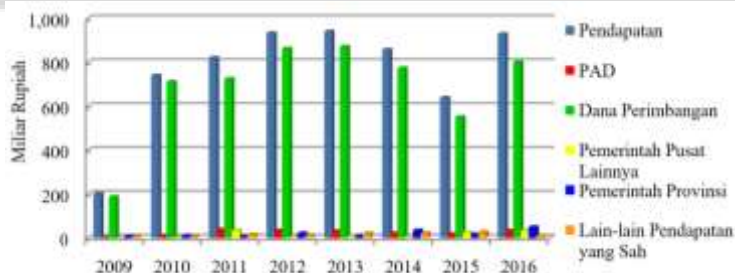
Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	52.10	50.90	50.09	50.63	50.69
Pertanian					
Kehutanan	1.24	1.15	1.12	1.09	1.13
Perikanan	46.66	47.96	48.79	48.27	48.19

Sumber: BPS KKA (2016)

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

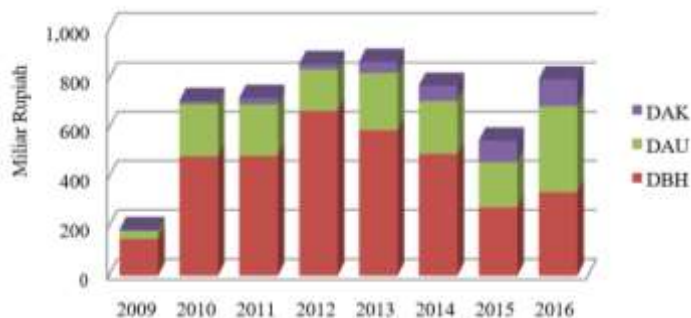
Dana perimbangan di (KKA) merupakan jenis transfer yang terbesar selama delapan tahun anggaran berturut-turut dalam struktur pendapatan daerah (Gambar 1). Hal ini dikarenakan KKA merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau (Kemenkumham 2008) dan masih berada dalam usaha untuk mengatasi persoalan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal.



Sumber: Laporan realisasi APBD KKA tahun 2009-2016

Gambar 1. Grafik struktur realisasi pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Dana perimbangan, baik dalam bentuk dana transfer umum maupun transfer khusus di KKA cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Proporsi dana transfer khusus, yaitu DAK adalah yang paling rendah dalam struktur pendapatan dana perimbangan (Gambar 2). Nilai rata-rata DAK selama delapan tahun adalah 7 persen dari total dana perimbangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), DAK tercatat sebagai pengeluaran pemerintah, sebagai komponen belanja di daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan identifikasi anggaran dan belanja DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KKA tahun 2009-2016

Gambar 2. Grafik proporsi dana perimbangan daerah Kepulauan Anambas

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk reformasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam era otonomi daerah. Melalui mekanisme desentralisasi, sebagian besar fungsi kelautan dan perikanan secara bertahap menjadi bagian dari urusan daerah kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan pembiayaan melalui dana perimbangan, sehingga dengan semakin meningkatnya dana yang dikelola oleh daerah, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi lebih baik. DAK merupakan salah satu instrumen fiskal dana perimbangan, yang mengambil peranan penting dalam pencapaian bidang prioritas nasional (DJPK 2016). Sebagaimana dicatat oleh BAPPENAS (2013) dalam prioritas pembangunan nasional 2015-2019, isu permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah infrastruktur produksi yang belum optimal, yaitu pada armada penangkapan, pelabuhan, jalan usaha tani, lahan dan akses pengembangan usaha (modal dan pasar).

Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan agar visi nasional di bidang kelautan dan perikanan dapat tercapai. Strategi menjadi sebuah keputusan penting yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan, karena tidak selamanya implementasi yang dilakukan berjalan dengan lancar. Strategi diperlukan untuk memperoleh hasil terbaik yang bisa diperoleh dalam keterbatasan sumberdaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Maret sampai Juli 2017 di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani fungsi terkait, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kunjungan kepada responden/*stakeholder* yang dipilih dengan teknik *non probability sampling*, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2013). Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber baik internal maupun eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari instansi dimana penelitian dilakukan, yaitu data terkait DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA. Data dan informasi tersebut antara lain berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar instansi penelitian dilakukan, antara lain berasal dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Keuangan, Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan pustaka publikasi melalui jurnal, buletin, white paper dan terbitan lainnya yang terkait dengan data dan informasi DAK bidang kelautan dan perikanan.

Metode Pemilihan Responden

Model AHP didesain untuk menangkap persepsi lebih dari satu subjek yang memiliki kaitan erat dengan suatu objek permasalahan, secara rasional (Falatehan 2016). Kriteria subjek yang dipilih antara lain, mengerti akan permasalahan yang dikaji, merasakan sendiri akibat masalah tersebut atau memiliki kepentingan terhadap masalah. Teknik *sampling* yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*). *Judgement expert* yang dipilih terdiri dari 6 orang, yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan di Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Metode Analisis Data

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode analisis dalam perumusan kebijakan dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KAA adalah dengan menggunakan *Analytical Hierarchy*

Process. Analytical Hierarchy Process adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya (Permadi 1992). Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalam sebuah suatu hirarki (Marimin 2010). Tingkat kepentingan suatu variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dan secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Model AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap ahli (*expert*) sebagai input utamanya.

Penentuan tujuan pengambilan keputusan dilakukan di awal, yaitu untuk menentukan strategi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA agar lebih efektif. Langkah selanjutnya menentukan faktor yang dapat menjadi titik permasalahan dari tujuan utama, kemudian kendala, selanjutnya menetapkan kemungkinan alternatif kebijakan. Hirarki yang disusun ada lima level yang terdiri dari "tujuan" yaitu strategi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas; empat "faktor" yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan; lima "aktor" yaitu pemda Kepulauan Anambas, penyuluh/POL, masyarakat, penyedia barang dan penerima manfaat; lima "kendala" yaitu regulasi daerah, sarana dan prasarana, anggaran, SDM dan komitmen pelaku; dan lima "alternatif strategi" yaitu evaluasi regulasi daerah, meningkatkan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dengan kementerian teknis, penempatan tenaga pendamping atau petugas operasional lapangan, sosialisasi dan penegakan hukum dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pengembangan Wilayah Perikanan dan Kelautan

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 98,73 persen merupakan wilayah lautan sehingga kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya lebih memilih penangkapan ikan sebagai sektor utama dalam melakukan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2011, jumlah rumah tangga nelayan baik nelayan tangkap maupun budidaya berjumlah 4.078 orang. Produksi perikanan tangkap sebanyak 1.454,39ton dan produksi budidaya sebanyak 62,91 ton. Sementara, luas baku lahan usaha budidaya tahun 2011 sebanyak 28.980 m² dengan jumlah pembudidaya sebanyak 1.716 rumah tangga. Hasil produksi perikanan tangkap selain didistribusikan di pasar ikan juga diekspor ke luar negeri antara lain ke Hongkong dan Singapura. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, potensi sumberdaya ikan di Perairan Kepulauan Anambas dan sekitarnya diestimasi berjumlah 62.853,4 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 50.282,7 ton/tahun. Potensi tersebut diasumsikan berada pada perairan 0 sampai 12 mil. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan yang ada, potensi terbesar adalah potensi cumi-cumi yaitu 20.848,2 ton/tahun, berikutnya jenis ikan pelagis kecil dengan potensi sebesar 17.450,7 ton/tahun dan lobster sebesar 10.346,9 ton/tahun.

Analisis Pertumbuhan Belanja DAK

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk naik, namun pada belanja DAK bidang kelautan dan perikanan pertumbuhan berfluktuasi, mengalami pertumbuhan positif dan negatif yang cenderung bergantian (Tabel 2). Pada tahun 2012 belanja DAK mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,69 persen dari tahun 2011. Pada tahun 2013 pertumbuhan belanja DAK mengalami penurunan sebesar 6,22 persen dari tahun 2012 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 35,47 dari tahun 2013. Pada tahun 2015, pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 78,48 persen dari tahun 2014 dan mengalami perlambatan pertumbuhan drastis pada tahun 2016, yaitu sebesar 82,12 persen dari tahun 2015.

Tabel 2. Analisis pertumbuhan belanja DAK

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Efisiensi (%)	Pertumbuhan Belanja (%)
2011	5.751.995.571	4.260.536.956	74,07	25,93	
2012	6.884.604.000	3.689.338.000	53,59	46,41	19,69
2013	6.456.270.000	6.019.188.256	93,23	6,77	6,22
2014	4.166.537.000	3.764.920.300	90,36	9,64	35,47
2015	7.436.537.616	6.051.105.190	81,37	18,63	78,48
2016	1.329.680.000	1.285.610.500	96,69	3,31	82,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah (2011-2016)

Tingkat pertumbuhan belanja DAK dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu anggaran yang ditetapkan, jumlah program dan penyerapan anggaran pada tiap kegiatan. Pagu anggaran pada tahun 2015 lebih besar dan pagu anggaran pada tahun 2016 lebih kecil, besar kecilnya pagu anggaran ini tergantung pada jumlah program atau kegiatan dalam program yang diusulkan. Pada tahun 2015 jumlah program yang didanai berjumlah 6 program, jika dibandingkan dengan yang lain, pada tahun 2011, 2013 dan 2014 yang hanya terdiri dari 5 program. Pada tahun 2016 program yang didanai dengan DAK bidang kelautan dan perikanan berjumlah 1 program.

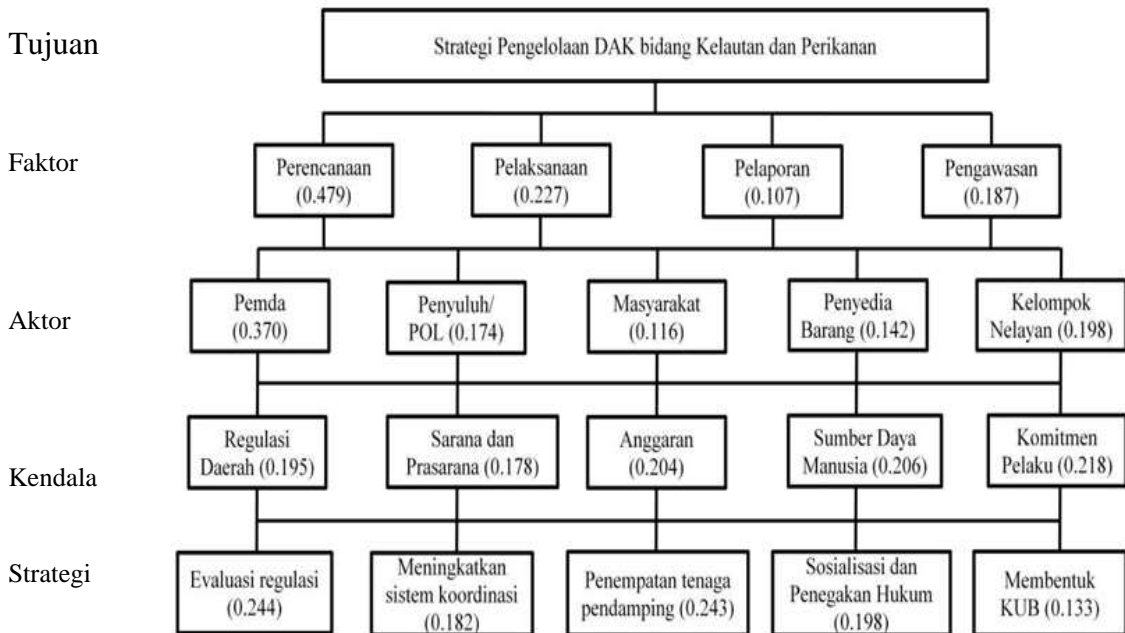
Tingkat penyerapan anggaran mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah berturut-turut tahun 2016, 2013, 2014, 2015, 2011 dan 2012. Perbedaan tingkat penyerapan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain sumber daya input, sumber daya manusia, keadaan alam, mekanisme pelaksanaan dan target yang ditetapkan. Faktor terbesar yang mempengaruhi penyerapan adalah sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.

Data efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi terbesar terjadi pada tahun 2012, namun efisiensi tidak selalu diartikan sebagai penghematan anggaran. Dalam hal ini, efisiensi yang besar terjadi karena terdapat beberapa kegiatan atau program yang tidak terlaksana sehingga realisasi anggaran menjadi kecil dan penyerapan anggaran rendah. Sebaliknya, efisiensi terendah terjadi pada tahun 2016 diikuti tahun 2013. Interpretasi efisiensi yang rendah dalam hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satuan perangkat daerah relatif baik. Kemampuan pemerintah untuk merealisasikan anggaran dan target-targetnya menjadi sangat

penting. Rendahnya realisasi dalam belanja publik mengindikasikan bahwa program dan aktivitas pemerintah pada tahun tersebut sedikit, sehingga tujuan pemerintah tidak tercapai sesuai dengan harapan (Fahlevi dan Ananta 2015).

Analisis Strategi Pengelolaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Perumusan strategi Pengelolaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Dalam metode AHP disusun hirarki yang mencakup lima level, yaitu tujuan, faktor, aktor, kendala dan strategi atau alternatif kebijakan (Gambar 3). Level pertama merupakan fokus perumusan strategi, yaitu pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan. Level kedua adalah faktor yang terdiri dari komponen terkait yang mempengaruhi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan. Komponen faktor terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Level ketiga adalah aktor yang terlibat di dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan adalah pemerintah daerah, penyuluh atau petugas operasional lapangan, masyarakat, penyedia barang dan kelompok nelayan. Level keempat merupakan kendala atau keterbatasan dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan. Komponen kendala terdiri dari regulasi daerah, sarana dan prasarana, anggaran, sumber daya manusia dan komitmen pelaku. Level terakhir merupakan strategi yang terdiri dari alternatif kebijakan yang dapat digunakan dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan agar lebih efektif.



Sumber: Data primer (2017)

Gambar 3. Struktur dan nilai bobot hirarki AHP strategi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa faktor utama pengelolaan DAK adalah perencanaan dengan nilai 0.479. Hal ini dikarenakan perencanaan adalah proses terpenting untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (PP 2008). Faktor penentu berikutnya adalah pelaksanaan dengan nilai 0.227 diikuti dengan pengawasan dengan nilai 0.187 dan pelaporan 0.107.

Hasil pengolahan horizontal pada pelaku pengelolaan DAK dalam faktor perencanaan adalah pemerintah daerah, dengan nilai 0.387. Pelaku utama dalam pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA adalah pemerintah daerah, dengan nilai berturut-turut 0.392; 0.356; dan 0.309. Dari hasil rekapitulasi untuk urutan pertama pelaku pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA adalah pemerintah daerah dengan nilai 0.361. Hal ini dikarenakan pemerintah lokal dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakatnya, sehingga keputusan yang diambil akan sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sidik 2002).

Kendala utama dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA berdasarkan hasil analisis AHP adalah komitmen pelaku. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses perencanaan, usulan masyarakat kerap tidak diperhitungkan dan tidak dimuat dalam dokumen perencanaan. Suwardi dan Utomo (2011) menyatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, dengan kata lain dari segi organisasi, *stakeholder* yang berkomitmen tinggi cenderung menghasilkan kinerja yang optimal.

Hasil pengolahan horizontal untuk alternatif kebijakan dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA adalah dengan melakukan evaluasi regulasi. Evaluasi regulasi menjadi prioritas utama dengan nilai 0.244. Hal ini dikarenakan evaluasi penting untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan, yang belum dilakukan dan sejauh mana pelaksanaannya sehingga dapat diambil keputusan untuk langkah yang harus dilakukan berikutnya. Zanakis *et al.* 1995 menyatakan bahwa hampir seluruh organisasi mengalami permasalahan yang memerlukan evaluasi perencanaan program atau kegiatan yang berkaitan dengan rendahnya sumberdaya, baik anggaran, manusia, pendukung.

Alternatif yang menjadi pilihan berikutnya adalah penempatan tenaga pendamping dengan nilai 0.241. Tenaga pendamping berupa penyuluh atau petugas operasional lapangan sangat dibutuhkan mengingat kondisi daerah KKA merupakan gugus kepulauan sehingga keberadaan tenaga pendamping akan memperpendek rentang kendali antara satuan kerja, baik dinas maupun unit pelaksana teknis dengan masyarakat maupun penerima manfaat DAK bidang kelautan dan perikanan.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dari alternatif yang dikemukakan sesuai dengan prioritas AHP agar pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas lebih efektif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi regulasi berarti meninjau ulang peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan DAK yang lebih efektif. Proses evaluasi program atau kegiatan serta implementasinya yang cukup dikenal

- adalah mengikuti tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, evaluasi, seleksi, alokasi dan implementasi (Zanakis *et al.* 1995).
- b. Penempatan tenaga pendamping atau petugas operasional lapangan di setiap kecamatan atau ruang lingkup yang lebih kecil dapat memperpendek rentang kendali pembinaan dan pengawasan DAK. Kondisi geografis yang berbentuk gugusan kepulauan dapat menjadi faktor pembatas dalam usaha melakukan peninjauan langsung. Dengan adanya tenaga pendamping, kualitas pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat berjalan dengan optimal.
 - c. Sosialisasi dan penegakan hukum diperlukan untuk mendukung pengelolaan DAK terutama dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pengelolaan barang atau aset daerah yang bersumber dari DAK bidang kelautan dan perikanan. Disarankan agar adanya pembinaan terus menerus terhadap sikap dan perilaku agen (pemerintah) dalam bekerja sehingga sasaran kerja tercapai sesuai yang telah ditentukan dan pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku sehingga sistem pengelolaan DAK berjalan dengan baik.
 - d. Meningkatkan sistem koordinasi, konsultasi dan konsolidasi. Effendy (2013) menyatakan bahwa suatu sistem kerja yang dapat mempengaruhi ketaatan, kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dapat diciptakan tidak hanya dengan melakukan pembinaan mental namun juga dengan peningkatan penggunaan suatu sistem yang dapat menjangkau tingkat pemerintahan yang berbeda.
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan wadah bagi pelaku kegiatan kelautan dan perikanan yang beranggotakan para nelayan baik nelayan tangkap, budidaya dan pengelola perikanan. KUB diperlukan untuk mendukung pengelolaan DAK terutama dalam pemberian barang yang bersumber dari belanja DAK agar lebih tepat sasaran.

Rencana Implikasi Kebijakan

Tabel 3. Rencana strategi implikasi kebijakan

No	Strategi	Kegiatan	Pelaksana
1	Evaluasi regulasi	Identifikasi regulasi terkait pengelolaan DAK, seleksi dan alokasi regulasi yang belum terperinci, membuat usulan rancangan regulasi yang diperlukan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan
2	Meningkatkan sistem koordinasi, konsultasi dan konsolidasi	Membangun sistem koordinasi pengelolaan DAK dengan Kementerian dan Unit Layanan Pengadaan	Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
3	Penempatan tenaga pendamping	Bimbingan teknis tenaga pendamping dan penempatan satu pendamping satu desa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan

4	Sosialisasi dan penegakan hukum	Membangun zona integritas menuju <i>stakeholder</i> taat hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan
5	Membentuk KUB	Membentuk forum tematik Bersama masyarakat nelayan/perikanan	Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan

Sumber: Data primer (2017), diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis belanja DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas diketahui bahwa anggaran dan pertumbuhan belanja terbesar terdapat pada tahun 2015 dengan 6 program DAK. Belanja dengan varians terbesar terdapat pada tahun 2016 dengan 1 program.
2. Alternatif strategi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA berdasarkan hasil analisis AHP sesuai urutan prioritasnya yaitu evaluasi regulasi terkait pengelolaan DAK, penempatan tenaga pendamping, sosialisasi dan penegakan hukum, meningkatkan sistem koordinasi serta membentuk Kelompok Usaha Bersama.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. SDM penyusun laporan DAK atau sub bagian program perlu ditingkatkan kompetensinya agar mampu mengumpulkan, membaca dan menganalisis data kinerja secara keseluruhan sehingga menjamin kualitas data laporan.
2. Perlu penetapan target outcome DAK secara konkret dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan metode perhitungan tertentu dan pencatatan pencapaiannya sehingga efektivitas dapat diukur dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015- 2019*. Jakarta (ID): Direktorat Kelautan dan Perikanan.
- [BPS KKA] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. 2015. *Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015*. Tarempa (ID): BPS Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Brodjonegoro B, Martinez-Vazquez J. 2005. An Analysis of Indonesia's transfer system: recent performance and future prospects. Economics Faculty Publications. Atlanta (USA): Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Effendy Y. 2013. Tinjauan hubungan opini WTP BPK dengan kasus korupsi pada pemda si Indonesia kajian manajemen keuangan pemerintah, hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pemeriksa (auditor). *J Manajemen dan Bisnis*. 13(1):46-55.
- Falatehan AF. 2016. *Analytical Hierarchy Process (AHP): Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah*. Yogyakarta (ID): Indomedia Pustaka.

- [KKA] Kabupaten Kepulauan Anambas. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2005-2025. Tarempa (ID): Bappeda KKA.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Zanakis SH, Mandakovic T, Gupta SK, Sahay S, Hong S. 1995. A review of program evaluation and fund allocation methods within the service and government sectors. *Socio-Econ Plann Sci*. 29(1):59-79.